



©2004 Sekolah Pascasarjana IPB
Makalah Kelompok III Semester Ganjil 2004
Materi Diskusi Kelas
Falsafah Sains (PPS 702)
Program S3
November 2004

Posted 2 November 2004

Dosen:

Prof. Dr. Ir. Rudy C. Tarumingkeng (Penanggung Jawab)
Prof. Dr. Ir. Zahrial Coto
Dr. Ir. Hardjanto

FORMULASI KONSEPTUAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LINGKAR KAWASAN INDUSTRI (STUDI KASUS DI PT. SEMEN CIBINONG tbk.)

Oleh:

Kelompok III

Muksin	P061030031	PPN
Sapja Anantanyu	P061030041	PPN
Ibrahim Saragih	P061030101	PPN
Sri Tjahjorini	P061030111	PPN
Syafiuddin	P061030120	PPN
Bustang	P061030121	PPN
Marliati	P05600009	PPN
Desta Wirnas	P361030041	AGR
Dewi Sukma	A361030031	AGR
Diny Dinarti	A361030051	AGR
Sri Listiyowati	G361030011	BIO
Ipranta	C261040161	SPL
R. Abd Djamali	C261030041	SPL
Nana Mulyana	E061040082	IPK

ABSTRACT

National economic development may not disregard community development. To exploit natural resources by a company will generate conflict if its existence not give benefit at community life. It was needed a systematic and planed effort in the community development in order to the industrial existence, like PTSC. It is able to give contribution to national economic development and to increase community life.

I. PENDAHULUAN

1.1. Dasar Pemikiran

Pembangunan yang menekankan pertumbuhan ekonomi dengan indikator kesejahteraan materi, terbukti tidak memberikan signifikansi kesejahteraan terutama bila

diukur dengan indikator-indikator im-materi. Salah satu hal mendesak yang terlihat sebagaimana dinyatakan banyak pihak, adalah kehancuran kelembagaan masyarakat (pedesaan) karena pendekatan pembangunan yang bersifat *top down* dan hambatan aktivitas yang bersifat represif. Sejauh ini konflik-konflik yang bersifat kritis dan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah direspons dengan pendekatan militeristik. Tak terkecuali pada upaya-upaya menumbuhkan perekonomian Indonesia yang ditopang dengan korporasi besar yang bersifat monopolistik.

Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa konflik-konflik yang muncul akibat adanya suatu korporasi pada komunitas tertentu, ternyata mudah diredam dengan pendekatan represif bersifat militeristik. Kondisi yang sedemikian menekan ini telah begitu lama dirasakan oleh masyarakat.

Dalam kenyataannya pada dekade lima tahun terakhir, sejak digulirkan proses reformasi, terdapat beberapa fenomena yang menggelayut pada dunia usaha di Indonesia. Beberapa yang menonjol dari pemmasalahan-permasalahan yang mencuat adalah sengketa kepemilikan tanah dimana tempat dunia usaha beraktivitas. Selain itu tuntutan kesejahteraan dari masyarakat sekitar, utamanya menyangkut penghidupan yang semestinya lebih layak, dengan keberadaan suatu usaha tertentu yang ada.

Beberapa alasan yang menyebabkan kondisi ini antara lain dapat disebabkan karena: (1) Lembaga usaha kurang mampu dalam mendekati masyarakat sekitar (desa pagar), utamanya ketepatan akan kebutuhan masyarakat tersebut, (2) Suasana euforia reformasi masih tinggi, yang terkadang banyak diartikan sebagai kebebasan yang tak terkendali

Persoalan yang mengemuka pada saat ini, tidak lepas dari paradigma lama, khususnya dalam konsep pembangunan, lebih menekankan pada pendekatan *top down* dan represif. Namun demikian, pada saat ini kita sudah mulai mengalami proses pergantian paradigma (*paradigm shift*). Belajar dari kelemahan pendekatan pembangunan yang sentralistik dan intervensionis dengan pendekatan baru, yaitu pembangunan yang berwawasan kebutuhan dasar (*basic need development*) yang berpusat pada rakyat (*people center development*) dan berkelanjutan (*sustainable*).

PT Semen Cibinong (PTSC) pada awal-awal berdirinya juga memiliki permasalahan-permasalahan terkait dengan lingkungan, baik manusia maupun alam. Dari beberapa informasi diketahui bahwa PTSC pernah mengalami suatu masa dimana kondisi polusi dari debu yang ditimbulkan dalam pembuatan semen telah mencemari lingkungan sekitarnya. Indikator ini dapat dilihat dari tebal debu di sekitar industri terutama yang menempel pada daun-daunan.

Kondisi-kondisi lingkungan yang tercemar, eksploitasi sumberdaya alam yang terus-menerus telah menjadi pemicu timbul konflik-konflik antara komunitas dengan PTSC. Kondisi ini dengan demikian dapat mempengaruhi kinerja produksi. Implikasinya tentu saja berpengaruh terhadap pendapatan dan gerak ekonomi yang disebabkan oleh PTSC.

Keberadaan PTSC di satu sisi adalah sebuah keniscayaan. Artinya keberadaan PTSC tidak dapat dituding sebagai agen eksploitatif terhadap alam semata, tapi PTSC telah menggerakkan roda ekonomi, menyerap tenaga kerja dan menghidupi banyak anggota masyarakat pekerjanya. Bila dihentikan maka ratusan bahkan ribuan orang yang menggantungkan nasib pada PTSC akan terlantar.

Mencermati kondisi masyarakat sekitar PTSC yang memiliki pendapatan relatif masih rendah dan tingkat pendidikan yang relatif masih rendah, perlu kiranya ada kesertaan PTSC dalam membangun masyarakat sekitar. Sama dengan perjalanan perkembangan sistem politik pada saat awal berdiri PTSC, maka pada saat itu koreksi terhadap PTSC dalam bentuk ketidakpuasan, telah didekati secara represif oleh pemerintah dalam rangka mengamankan investasi.

Terdapat empat hal mendasar suatu usaha tambang terkait hubungannya dengan komunitas: (1) Perusahaan tambang memiliki batas jangka tertentu dalam beroperasi terkait dengan jumlah cadangan sumberdaya alam yang ada. Dengan demikian memiliki implikasi pada eksploitasi Sumberdaya alam; (2) Industri pertambangan memiliki karakter padat modal dan memiliki input teknologi tinggi; (3) Umumnya membutuhkan sarana transportasi dan infrastruktur lain agar tercapai kelancaran proses produksi. Dampaknya sarana transportasi akan disediakan oleh industri tambang; dan (4) Dengan produk olahan dari bahan alam melalui proses tertentu, rawan memiliki residu berbahaya terhadap lingkungan. Dengan demikian perusahaan tambang memiliki kekentalan terhadap isu-isu lingkungan.

Fakta bahwa kepentingan PTSC sebagai lembaga ekonomi yang menghasilkan profit, di sisi lain komunitas tidak boleh dirugikan oleh kehadiran PTSC dan harus dikembangkan seiring dengan semakin meningkatnya perkembangan PTSC, menjadi dasar pemikiran perlunya suatu model implementasi tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility* atau *CSR*) yang lebih terprogram dan berdimensi memberdayakan. Artinya aktualisasi CSR oleh PTSC harus didesain sedemikian rupa sehingga tidak terbatas pada aktifitas yang bersifat karitatif, akan tetapi lebih bermakna dan berimplikasi membangun kemandirian (*self reliance*) komunitas untuk dapat menolong dirinya sendiri dalam memecahkan persoalan-persoalan hidup menuju kesejahteraan yang lebih didambakan dalam arti yang sebenarnya.

1.2. Tujuan Penulisan

Makalah ini bertujuan untuk memberikan gambaran (kelebihan dan kelemahan) model pendekatan PTSC dalam memberdayakan masyarakat dan memberikan alternatif formulasi konseptual pemberdayaan masyarakat sekitar PTSC.

II. PTSC DAN PELAKSANAAN *COMMUNITY RELATION*

2.1. PT Semen Cibinong

PT Semen Cibinong (PTSC) telah berkiprah dalam usaha produksi semen sejak kurang lebih 25 tahun yang lalu. Manajemen PTSC saat ini telah dipegang oleh manajemen asing dan bersifat terbuka (PTSC *tbk*).

Secara umum, PTSC melakukan proses produksi dengan mengambil bahan baku yang berasal dari sumberdaya alam di wilayah Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor. Bahan dasar yang dibutuhkan dalam proses produksi antara lain: batu karang, silt, instone berasal dari lokal, sedangkan pasir besi diambil dari Cilacap, dan air didapatkan dari Cileungsi.

Tenaga kerja sebagian besar (yang terdidik) berasal dari daerah luar lokasi PTSC. Sedangkan tenaga kerja yang bersifat tenaga kerja rendah banyak juga berasal dari lokal. Kondisi ini sesuatu yang lumrah dan wajar mengingat pada awalnya PTSC didirikan membutuhkan spesifikasi tenaga kerja tertentu, yang sangat mungkin belum tersedia di daerah lokasi, akan tetapi direkrut dari luar daerah.

Dalam perkembangannya PTSC telah mencoba mengikuti pergantian paradigma pembangunan, khususnya terkait dengan peran PTSC terhadap masyarakat sekitar (masyarakat pagar). Secara eksplisit sebagaimana dinyatakan oleh *Community Relations & Security Affairs (CRSA)* (2002), bahwa terdapat kesadaran PTSC *tbk* untuk memberikan perhatian dan pengawasan terhadap masyarakat sehingga PTSC selanjutnya memandang masyarakat sebagai mitra. Pada perkembangannya PTSC berusaha untuk merealisasi komitmennya bahwa kehadiran PTSC diharapkan dapat memberikan manfaat dan nilai tambah bagi masyarakat sekitarnya.

Dalam pelaksanaan kegiatan, pengembangan perusahaan saat ini harus berpijak dan dilandaskan terhadap pemahaman yang berdasarkan konsep pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) dengan tiga sendi utama yang mengokohkan, yaitu: (1) Pertumbuhan ekonomi, (2) Kinerja lingkungan, dan (3) Tanggung-jawab sosial.

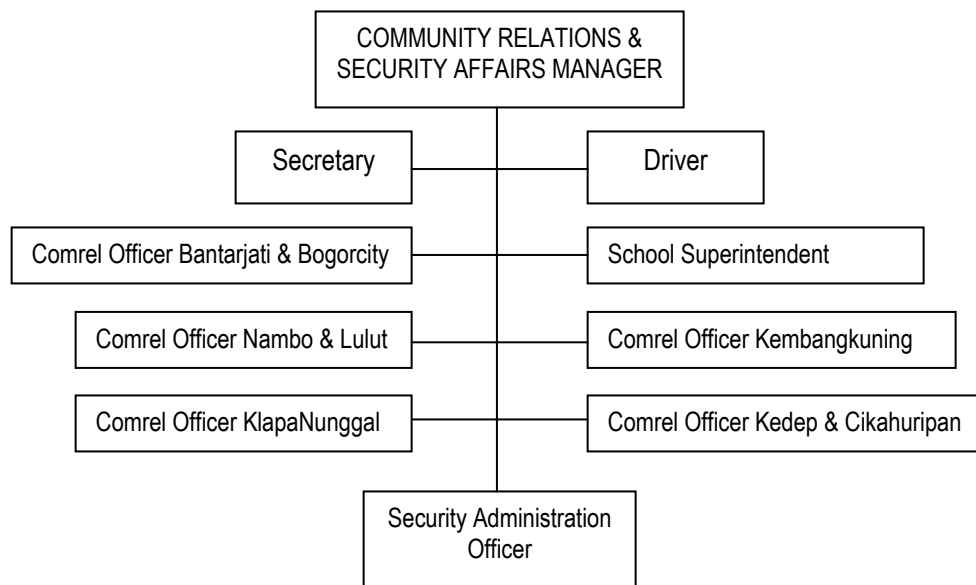
Sebagai salah satu implementasi pembangunan berkelanjutan tersebut, perusahaan sejak awal tahun 2002 telah menetapkan visi dan misi disertai dengan azas perilaku perusahaan yang berusaha ditransformasikan sebagai perilaku oleh semua komponen dalam PTSC. Yang dimaksud dengan azas perilaku perusahaan tersebut adalah:

- ❑ Menjadi warga yang bertanggung jawab dalam mendukung kesejahteraan masyarakat sekitarnya
- ❑ Menjunjung tinggi nilai-nilai religius dalam sikap penuh toleransi, keterbukaan, kesungguhan hati, kejujuran, dan integritas dalam setiap tindakan kita
- ❑ Saling menghargai sesama, baik perusahaan, pemegang saham, dan lingkungan sekitar tempat kita tinggal dan bekerja
- ❑ Bangga dan penuh percaya diri terhadap keberhasilan, kerjasama tim, keterbukaan dan kinerja yang baik
- ❑ Kepastian dalam menepati janji melalui tindakan dan bertanggung jawab terhadap hasil kerja
- ❑ Meningkatkan kesejahteraan karyawan
- ❑ Kita berusaha memastikan bahwa bekerja pada perusahaan merupakan sebuah pengalaman yang menyenangkan
- ❑ Menerapkan sistem kinerja lingkungan hidup yang berkesinambungan
- ❑ Keselamatan kerja adalah mutlak tidak bisa ditawar

Kesadaran PTSC terhadap pentingnya membangun hubungan yang baik pada akhirnya diwujudkan dalam bentuk upaya nyata membangun hubungan dengan masyarakat yang ditangani oleh sebuah departemen khusus yang berada dalam organisasi PTSC secara keseluruhan. Sehingga pada tahun 2002 perusahaan membentuk Departemen *Community & Security Affairs (CRSA)*, satu unit kerja yang secara khusus menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan masyarakat, pemerintah setempat dan pihak-pihak terkait lainnya di sekitar lokasi PTSC dan mengkoordinasikan bidang pengamanan pabrik (PTSC, 2002).

2.2. Kegiatan *Community Relation*

Dengan maksud memfokuskan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan hubungan masyarakat secara keseluruhan, maka dibentuklah satu unit kerja tersendiri berbentuk departemen dalam struktur organisasi PTSC. Struktur Departemen CRSA sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi COMMUNITY RELATIONS & SECURITY AFFAIRS MANAGER

Pada Gambar 1 Departemen CRSA dimaksudkan sebagai unit yang menangani hubungan dengan masyarakat sekaligus unit keamanan. Departemen ini membawahi lima orang *officer* yang bertugas di masing-masing desa binaan. Terdapat 7 desa binaan yang inti. Desa-desa ini dikategorikan menjadi 3 ring (lapisan):

- (1) Desa Nambo, Kembang Kuning, Klapanunggal - Kecamatan Klapanunggal. Ring 1 adalah desa-desa yang langsung berbatasan dengan PTSC.
- (2) Desa Lulut, Bantar Jati, Cikahuripan – Kecamatan Klapanunggal, Dusun Kedep Desa Telajun Udik, Kecamatan Gunung Putri. Desa-desa ini adalah zona yang tidak berbatasan langsung dengan PTSC akan tetapi terkena, getaran suara peledakan eksploitasi karang, dan semburan debu akibat penggalian/ penambangan.
- (3) Desa-desa yang agak jauh yang berada di luar ring II.

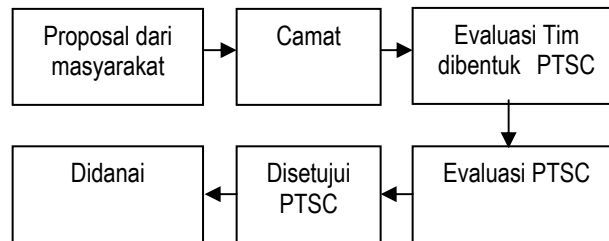
Wilayah kegiatan CRSA secara keseluruhan dapat dijabarkan sebagai berikut:

- (1) Binaan langsung, terdiri dari:
 - (a) Nambo, Kecamatan Klapanunggal
 - (b) KembangKuning Kecamatan Klapanunggal
 - (c) Klapanungga Kecamatan Klapanunggal
 - (d) Bantarjati Kecamatan Klapanunggal
 - (e) Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal

- (f) Lulut Kecamatan Klapanunggal
 - (g) Dusun Kedep, Desa Telajun Udik-kecamatan Gunung putri
 - (h) Organisasi Kepemudaan Kecamatan Klapanunggal (FKP)
- (2) Wilayah binaan di luar lingkaran keliling lokasi Pabrik Narogong, meliputi:
- (a) Cibadak, Sukabumi
 - (b) Maloko, Rumpin, Tangerang
 - (c) Tuban, Jawa Timur
- (3) Instansi Pemerintah Daerah, terutama di Instansi di Kecamatan Klapanunggal dan sekitarnya.

Bentuk kegiatan yang selama ini dilakukan masih bisa dikategorikan sebagai kegiatan derma (*charity*). Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat diajukan kepada PTSC kemudian akan dievaluasi oleh PTSC dan disetujui untuk dilaksanakan.

Bila dilihat dari kegiatan secara keseluruhan yang dilakukan oleh PTSC maka kegiatan yang dilaksanakan oleh PTSC tergolong *self managing*. Artinya kegiatan-kegiatan membantu masyarakat dilakukan sendiri oleh PTSC dengan membentuk unit tersendiri. Pemberian bantuan untuk kegiatan dilakukan melalui prosedur: verifikasi oleh Tim yang dibentuk oleh PTSC terdiri dari Camat, Kapolsek, Koramil, Dinas terkait, kepala desa. Tahapannya sebagai berikut:



Gambar 2. Skema Prosedur Pemberian Bantuan oleh PTSC

Program yang telah dilaksanakan oleh CRSA pada Tahun 2002 disusun berdasarkan hasil survei oleh satu lembaga swadaya masyarakat GERAM (Gerakan Rakyat Anti Madat). Hasil survei itu terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan aparat desa dan tokoh masyarakat di tiap-tiap desa untuk kemudian sebagai bahan dan landasan tersusunnya program 2002.

Secara garis besar program tahun 2002 meliputi bidang-bidang:

- (1) Bidang Infrastruktur, antara lain meliputi:
 - Pembangunan jalan desa, jembatan, parit, tempat pemakaman umum
 - Pembangunan/renovasi kantor desa, masjid, mushola, madrasah dan sekolah
- (2) Bidang Ekonomi, antara lain meliputi:
 - Dana bergulir (*revolving fund*)
 - Pemberdayaan usaha lapak batu
- (3) Bidang sosial, antara lain meliputi:
 - Posyandu dan penyuluhan kesehatan, khitanan massal, beasiswa

- Bantuan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan peringatan hari-hari besar keagamaan
- Santunan anak yatim dan orangtua jompo
- Paket lebaran

Pada tahun 2002 PTSC telah menyalurkan bantuan kepada masyarakat sebesar Rp. 1.870.071.953,- dalam bentuk proyek-proyek yang tersebar di enam desa binaan Kecamatan Klapanunggal ditambah dengan Dusun Kedep, dan instansi pemerintah.

III. IDENTIFIKASI KELEBIHAN DAN KELEMAHAN *COMMUNITY RELATION* PTSC DALAM PERSPEKTIF *COMMUNITY DEVELOPMENT*

Kelebihan dan kelemahan dalam *community relation* dalam konteks ini akan dikaji berdasarkan dasar pemikiran konsep *community development*. Upaya ini dilakukan untuk mengarahkan pengembangan masyarakat oleh PTSC benar-benar mampu memberikan kontribusi pada pemberdayaan komunitas yang tercermin dalam bentuk peningkatan kemandirian komunitas.

Community development sebagaimana dinyatakan Gray (1959) dapat didefinisikan: “*as a process designed to create conditions of economic and social progress for the whole community with its active participation and the fullest possible reliance upon the community’s initiative*”. Selanjutnya dikatakan bahwa *CD* mengandung dua implikasi aktivitas penting yaitu: (1) kesempatan dan kapasitas untuk bekerjasama (*co-operation*), memandirikan diri (*self-help*), kemampuan melakukan adaptasi untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam menempuh hidup yang lebih baik; (2) proses penguatan yang bersifat mandiri dan tidak tergantung dengan sumberdaya dari luar. Dalam konteks ini maka *CD* adalah kegiatan memandirikan sehingga dengan inisiatifnya masyarakat mampu berpartisipasi dan menentukan kemampuan diri sendiri. Sesungguhnya strategi dan proses pemberdayaan yang benar-benar asli dan mendasar membutuhkan waktu yang sangat panjang, energi dan komitmen yang tinggi, perubahan struktural yang dalam hal ini sangat mungkin harus dicapai melalui suatu perjuangan yang amat keras (Liffman dalam Ife, 1995).

Pembangunan masyarakat secara umum diartikan sebagai usaha guna mengembangkan atau menaikkan kualitas hidup masyarakat (*community*). Namun pada umumnya istilah ini digunakan dalam suatu lingkup paham yang lebih sempit untuk menerima masukan stimulasi dari luar ke dalam lingkungan suatu masyarakat, dengan tujuan untuk mendorong dan membantu pendayagunaan sumber-sumber lokal guna meningkatkan taraf hidup (Budiman, 2000). Ada dua elemen penting yang tersirat dalam batasan tersebut: “partisipasi masyarakat” itu sendiri dalam usaha mereka untuk meningkatkan taraf hidup, dengan sebesar mungkin ketergantungan pada inisiatif dalam mengambil keputusan sendiri; serta pembentukan pelayanan teknis dan bentuk-bentuk pelayanan yang dapat mendorong timbulnya inisiatif, sifat swadaya dan kegotong-royongan yang membuatnya lebih efektif.

Secara teoritis, masukan dalam program pembangunan masyarakat memang dibuat guna mendorong serta merangsang inisiatif dan usaha lokal, dan juga membantu perolehan bantuan-bantuan teknis, keuangan serta bentuk-bentuk bantuan lainnya yang

sekiranya dibutuhkan oleh komunitas yang bersangkutan, yang diharapkan datang dari komunitas itu sendiri (Conyer, 1994).

Terdapat beberapa alasan penting sehingga *CD* dapat menjadi proses dan fasilitasi untuk menuju masyarakat yang lebih mandiri:

- a. *CD* adalah proses bertahap (*incremental process*) melalui proses pendidikan. Konsekuensinya proses pendidikan yang tepat akan menanamkan kesadaran sehingga seseorang mengalami proses belajar, mengubah pengetahuan, sikap, dan keterampilan tertentu, sehingga seseorang menjadi tahu, mau dan mampu untuk melaksanakan perubahan.
- b. *CD* pada dasarnya memberikan fasilitasi agar masyarakat merekatkan kerjasama melalui kelembagaan ataupun organisasi-organisasi yang hidup dalam masyarakat. Konsekuensinya kelembagaan yang hidup mampu menjadi daya ikat serta wadah untuk saling belajar dan mengingatkan. Implikasinya kelembagaan yang kuat mampu untuk memberikan fasilitasi jaringan (*network*) yang merekatkan unsur-unsur yang berbeda (profesi, status sosial, maupun ekonomi).
- c. Dalam masyarakat Indonesia sejak dulu terdapat rekatan-rekatan nilai yang memberikan fasilitasi untuk pengontrolan terhadap aktivitas (Gani, 2000; Sayogyo, 2000). Nilai-nilai itu antara lain saling kepercayaan (*trust*), menghormati hak milik orang lain, serta tata nilai lainnya, yang dapat menjadi modal sosial (Fukuyama, 2000; Kisubi, 1999).

3.1. Kelebihan model *Community Relation*

Secara umum upaya memperbaiki hubungan dan upaya-upaya untuk menunjukkan komitmen PTSC terhadap masyarakat lokal telah dilaksanakan. Salah satu indikator penting dalam melihat kesungguhan PTSC dapat dilihat dari besarnya alokasi anggaran yang difokuskan pada kegiatan membantu masyarakat baik dari aspek ekonomi, sosial, fisik berupa infrastruktur.

Dana pada tahun 2002 untuk kegiatan membantu masyarakat telah dialokasikan Rp. 1.870.071.953,-. Nilai ini belum termasuk fasilitasi pendanaan yang diberikan kepada lembaga mitra dalam hal ini LSM GERAM untuk melakukan kegiatan survei identifikasi kebutuhan masyarakat lokal, sehingga menjadi kegiatan yang dilaksanakan oleh PTSC pada tahun 2002. Secara rinci jumlah nilai total pembiayaan CRSA tahun 2002 untuk kegiatan masyarakat sebagai berikut:

Tabel 1. Resume Proyek Bantuan PTSC Tahun 2002

No	Desa/ Daerah Penerima Bantuan	Bantuan PTSC					Sub Total Bantuan ke Desa (Rp)
		Infrastruktur			Ekonomi (Rp)	Sosial (Rp)	
		Semen		Cash (Rp)			
		Zak	Nilai (Rp)				
1	Desa Nambo	580	14.800.000	111.888.500		150.533.830	277.222.330
2	Kembanguning	630	14.865.000	173.333.500		121.866.250	310.064.750
3	Klapanunggal	585	14.390.000	31.970.500		111.264.528	157.625.028
4	Cikahuripan	860	21.390.000	91.165.000		33.663.300	146.218.300
5	Dusun Kedep	48	48.228.000	178.972.100		12.536.696	239.736.796
6	Bantarjati	410	9.990.000	82.952.700		33.888.688	126.831.388

7	Lulut	268	82.548.200	51.468.238		23.536.430	157.552.868
8	Instansi Pemerintah	1.375	34.690.000			41.180.000	75.870.000
9	Daerah Maloko/ Rumpin					41.050.000	41.050.000
10	Kab Sukabumi	1.700	41.600.000			42.492.200	84.092.200
11	Kec. Klapanunggal	280	6.820.000	87.531.500		117.455.000	211.806.500
12	Plant site Tuban					24.871.793	24.871.793
13	Kab. Bogor	580	14.480.000			8.500.000	22.980.000
Total Bantuan		7.316	303.801.200	809.282.038		762.838.715	1.875.921.953

Sumber: CRSA Implementasi kegiatan 2002

Berdasarkan data alokasi dana untuk kegiatan yang ditujukan kepada masyarakat dapat diketahui bahwa kegiatan pembangunan fisik (infrastruktur) masih mendominasi bantuan yang diberikan oleh PTSC, yakni hampir mencapai 60%. Dana ini dialokasikan untuk pemberian kebutuhan semen sekitar 16%, dan bantuan langsung (*cash*) sebanyak 43%. Selanjutnya sekitar 40% alokasi bantuan diberikan untuk kegiatan yang tergolong kegiatan-kegiatan sosial.

Mencermati alokasi anggaran dan upaya-upaya lain dalam rangka ikut berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat, terdapat beberapa kelebihan yang dapat dilihat dari kegiatan yang telah dilakukan oleh PTSC:

- (a) Kejelasan komitmen untuk membantu masyarakat ditunjukkan dengan besar angka bantuan baik untuk kegiatan fisik (infrastruktur) maupun kegiatan sosial, yang dilaksanakan oleh PTSC secara langsung
- (b) Komitmen untuk berpartisipasi telah disadari sebagai bagian visi dari perusahaan sebagai tanggung jawab sosial
- (c) Bangunan fisik, bantuan sosial dalam beberapa hal telah membantu masyarakat terkait kemudahan transportasi karena kualitas jalan secara fisik, sehingga memungkinkan kemudahan mobilitas. Sedangkan kegiatan sosial dalam beberapa level telah meningkatkan hubungan batin yang cukup terbina. Pemahaman yang positif (*positive image*) oleh masyarakat terhadap PTSC akan memberikan suatu ruang dan kondisi bagi produktivitas PTSC.
- (d) Perwujudan kesungguhan tersebut telah ditunjukkan dengan membentuk unit CRSA sebagai unit yang menangani khusus kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat. Ini menyiratkan bahwa PTSC menyadari kegiatan meningkatkan kemampuan masyarakat sekitar lokasi tidak bisa ditangani sambil lalu, tetapi harus secara serius oleh satu unit tersendiri yang bertanggung jawab kepada manajemen PTSC.
- (e) Telah dibentuknya tim verifikasi yang terdiri dari tokoh masyarakat, pihak desa, aparat kecamatan, dalam rangka menyeleksi usulan masyarakat. Kondisi ini akan memudahkan koordinasi antar aparat dengan PTSC, dan dalam beberapa hal dapat meminimalkan tumpang tindih pembiayaan terhadap suatu kegiatan tertentu yang dibutuhkan oleh masyarakat, pada perkembangan alokasi dana dapat dilakukan secara lebih efisien dan terfokus.
- (f) Usulan tentang kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat lokal, telah diupayakan secara maksimal menyerap aspirasi masyarakat, dengan fasilitasi dan panduan dari LSM GERAM, sehingga ketika usulan sudah berada di desa merupakan representasi kebutuhan masyarakat sesungguhnya.

- (g) Dengan demikian dalam beberapa hal, maka mekanisme yang sudah dikembangkan oleh PTSC dan pihak aparat terkait telah mencoba masuk pada ranah masyarakat sebagai subyek, dalam mengambil keputusan terhadap program apa atau bantuan apa yang dibutuhkan dan perlu dibantu.
- (h) Dalam beberapa kasus PTSC telah mengupayakan adanya kelompok-kelompok yang dilembagakan. Contoh forum komunikasi pemuda lokal, kelompok bongkar muat, dan kelompok pengrajin rotan.
- (i) Pembentukan kelompok akan memebrikan kemudahan untuk membina dan memfokuskan bantuan pendanaan yang dapat dikelola oleh kelompok, disamping terjadi proses pembelajaran melalui interaksi yang terjadi
- (j) Pada perkembangan terakhir telah diinisiasi pembentukan koperasi yang menyatukan beberapa desa, dengan pemodalan awal dari bantuan PTSC, diasumsikan akan beranggotakan masyarakat sekitar PTSC. Dalam implementasinya beberapa kegiatan produktif telah diupayakan terjadi jalinan kerjasama antara PTSC dengan koperasi tersebut.
- (k) Sebagaimana nampak dari struktur CRSA, maka PTSC telah mengupayakan menginisiasi sebuah lembaga pendidikan yang dapat dinikmati oleh masyarakat sekitar. Pada awalnya akan dibentuk sekolah dasar yang dapat menampung anak-anak masyarakat lokal. Dalam kenyataannya kegiatan ini masih belum terlaksana.

3.2. Kelemahan model pelaksanaan *Community Relation* PTSC

Kelemahan-kelemahan yang akan dibahas dalam uraian berikut adalah kekurangan-kekurangan yang terdapat pada pendekatan *community relation* dalam upaya mengembangkan masyarakat yang dapat berdampak kegagalan pencapaian tujuan memberdayakan masyarakat yaitu tidak tumbuhnya kepercayaan diri, kemandirian (*self reliance*), dan kemampuan memecahkan masalah sendiri (masyarakat) dalam rangka mengatasi persoalan hidupnya. Dengan demikian pembahasan terhadap kelemahan yang dimaksudkan disini diupayakan dan dibatasi dalam konteks sejauhmana prinsip-prinsip *CD* telah dicoba dilaksanakan.

Dari batasan dan ruang lingkup seperti ini maka pemahaman pelaksanaan pendekatan *community relations* yang diterapkan oleh CRSA akan dianalisis berdasarkan tiga aspek pengukuran. Berdasarkan pengamatan di lapangan, wawancara, dan data sekunder yang telah dikaji oleh Tim maka hasil analisis berdasarkan indikator yang telah dirumuskan sebelumnya dapat dijabarkan berikut ini.

- (1) Berdasarkan Matriks Paradigma Kedermawanan Sosial Perusahaan, yakni dari *charity corporate* sampai *philantropy corporate*. Artinya apakah perusahaan “se-kedar menjalankan kewajiban” sampai “demi kepentingan bersama” (*Saidi, 2002*). Hasil pengukuran ditampakkan pada Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Hasil Kategorisasi Paradigma Tanggung-jawab Sosial PTSC

NO	PARADIGMA	HASIL TEMUAN	KATEGORISASI		
			Charity	Philanthropy	Corporate citizenship
1	Motivasi	Norma etika perusahaan berdasar logika tanggung jawab sosial		√	
2	Misi	Mengatasi masalah sesaat	√		
3	Pengelolaan	Jangka pendek, menyelesaikan masalah sesaat, tapi sudah terorganisir	√		
4	Pengorganisasian	Unit kerja tersendiri, dengan SDM kurang memahami pendekatan CD	√	√	
5	Penerima Manfaat	Masyarakat kurang mampu, dan sebagian kelompok masyarakat lainnya	√	√	
6	Kontribusi	Hibah sosial dan pembangunan (belum nampak keterlibatan sosial secara signifikan)		√	
7	Inspirasi	Lebih cenderung sebagai kewajiban	√		

(2) Indikator-indikator pelaksanaan pengembangan masyarakat yang telah ditetapkan oleh pemerintah RI dalam hal ini yang dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI (dahulu bernama Departemen Pertambangan dan Energi, 1997), yakni:

- (a) Hubungan antara perusahaan dengan masyarakat
- (b) Hubungan antara perusahaan dengan pemerintah daerah dalam program CD
- (c) Pembangunan fisik (*Physical capacity building*)
- (d) Pembangunan Sosial (*Social capacity building*)
- (e) Pembangunan Ekonomi (*Economic capacity building*)
- (f) Lingkungan Fisik (*Cultural and legal capacity building*)
- (g) Pembangunan Budaya dan aspek Legal (*cultural and legal capacity building*)

Hasil pengukuran diperlihatkan pada Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Kategorisasi Berdasarkan Indikator Dep. Energi dan Sumberdaya Mineral Terhadap PTSC

NO	KEGIATAN	KATEGORISASI		
		Belum Dilaksanakan	≤ 50% - Dilaksanakan	Sudah dilaksanakan sepenuhnya
1	Hubungan antara perusahaan dengan masyarakat (belum adanya konsep CD yang jelas dan sistematis)	√		
2	Hubungan antara perusahaan dengan pemerintah daerah dalam program CD		√	
3	Pembangunan fisik			√
4	Pembangunan Sosial	√		
5	Pembangunan Ekonomi		√	
6	Lingkungan Fisik			√
7	Pembangunan Budaya dan aspek Legal		√	

- (3) Indikator-indikator pemberdayaan masyarakat sebagai misi utama pemberdayaan dalam sebuah program (LPM Equator, 2001), meliputi:
- Sejauh manakah proses Penyadaran dilakukan
 - Sejauh manakah proses Pengorganisasian dilakukan
 - Sejauh manakah proses Kaderisasi dilakukan
 - Sejauh manakah proses Dukungan Teknis dilakukan
 - Sejauh manakah proses Pengelolaan Sistem dilakukan

Hasil pengukuran ditampakkan pada Tabel 4 berikut ini:

Tabel 4. Hasil Kategorisasi Berdasar Indikator Prinsip Pemberdayaan

NO	KEGIATAN	KATEGORISASI		
		Belum Dilaksanakan	≤ 50% - Dilaksanakan	Sudah dilaksanakan Sepenuhnya
1	Proses Penyadaran	√		
2	Proses Pengorganisasian		√	
3	Proses Kaderisasi	√		
4	Proses Dukungan Teknis		√	
5	Proses Pengelolaan Sistem	√		

Dari pengukuran terhadap indikator-indikator diatas maka, dapat dinyatakan bahwa:

- PTSC dalam pendekatan *Comrel* saat ini masih tergolong sebagai *corporate charity*, artinya upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pembangunan atau pengembangan masyarakat lokal masih menonjolkan bantuan yang bersifat derma atau karitatif. Walaupun terdapat kemauan untuk menunjukkan tanggungjawab sosial. Kelemahan paling krusial yang dapat ditunjukkan dalam pendekatan semacam ini adalah muncul kecenderungan ketergantungan masyarakat lokal terhadap PTSC. Bila kondisi ini berlarut bisa jadi terjadinya kematian kemandirian masyarakat karena perasaan yang kuat dan menggandakan bantuan dari PTSC
- Bila dilihat dari indikator yang dikeluarkan oleh pemerintah RI, maka nampak bahwa terdapat kelemahan terutama pada aspek pembangunan ekonomi dan sosial, serta hubungan yang belum jelas antara PTSC dengan masyarakat. Kelemahan pada hubungan dengan masyarakat tercermin dari belum jelasnya konsep pengembangan masyarakat yang tersusun, serta mengandalkan aspek bantuan saat ini yang bisa dilihat. Sedangkan investasi kepada peningkatan SDM masih belkum banyak dilakukan atau belum dilakukan.
- Dari kelemahan-kelemahan pada (1) dan (2) di atas nampak bahwa semuanya disebabkan oleh lemahnya perencanaan *CD*. Indikatornya dapat dilihat dari *blueprint* pelaksanaan program alokasi anggaran untuk tahun 2002. Kelamahan ini tentu saja berdampak pada belum dilaksanakannya Proses Penyadaran, Proses Pengorganisasian, Proses Kaderisasi, Proses Dukungan Teknis, dan Proses Pengelolaan Sistem secara baik.

Kondisi-kondisi ini pada dasarnya dapat menyebabkan hal-hal sebagai berikut: rendahnya kesinambungan program yang dijalankan, rendahnya dimensi pemberdayaan

yang dilakukan dalam aktivitas bantuan, rendahnya kemandirian (*self-reliance*), besarnya ketergantungan, pragmatisme, rendahnya proses belajar, rendahnya ketepatan antara kebutuhan nyata masyarakat lokal dengan bantuan yang diberikan. Pada perkembangan lebih lanjut apabila kondisi ini terjadi terus menerus maka masyarakat lokal akan mengalami proses pemiskinan yang dilakukan secara tidak sengaja, dan titik kulminasi terjadi ketika PTSC telah meninggalkan lokasi produksi.

III. MERUMUSKAN ALTERNATIF KONSEPTUAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PTSC

Sebuah kerangka konseptual yang akan dirumuskan dalam kajian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan:

- (1) Upaya-upaya yang telah dan dicapai oleh PTSC terkait dengan kegiatan *community relation*
- (2) Kelebihan-kelebihan dan kelemahan-kelemahan pendekatan dalam upaya pengembangan masyarakat yang sedang dan telah dilaksanakan oleh PTSC
- (3) Kondisi faktual masyarakat lokal (*existing conditions*) terutama masyarakat yang terkategori secara geografis berada pada Ring I, yaitu masyarakat yang berbatasan langsung dengan PTSC. Berdasarkan hasil observasi di lapangan didapatkan data sebagai berikut:
 - Secara geografis batas wilayah Ring I desa binaan sebagai berikut:

Tabel 5. Batas wilayah desa-desa Ring I

NO	Wilayah	Batas Batas Wilayah			
		Utara	Selatan	Barat	Timur
1	Klapanunggal	Kec Cileungsi	Kembangkuning	Kembangkuning	Cikahuripan
2	Kembangkuning	Kec Gunungputri	Nambo	Kec Gunungputri	Klapanunggal
3	Nambo	Kembangkuning	Lulut	Kec Gunungputri	Kembangkuning

Sumber: Departemen CRSA PTSC

- Berdasarkan kondisi dinamika penduduk, maka dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 6 Kondisi dinamika penduduk Wilayah Ring I

NO	Wilayah	Kondisi		
		Perkotaan	Semi Perkotaan	Pedesaan
1	Klapanunggal	√	-	-
2	Kembang-kuning	√	-	-
3	Nambo	-	√	-

- Keseluruhan penduduk Kecamatan Klapanunggal (yang bekerja) adalah 62.616 dengan jumlah laki-laki 32.181, perempuan 30.435. Sedangkan jumlah kepala keluarga adalah 16.110. Tabel 7 menunjukkan proporsi jumlah penduduk pada lokasi Ring I terhadap PTSC.

Tabel 7. Proporsi jumlah penduduk desa berada pada Ring I Tahun 2003

NO	DESA	Jumlah Penduduk			Jumlah Kepala Keluarga
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Klapanunggal	3.336	3.261	6.597	1.607
2	Kembangkuning	3.383	3.404	6.787	2.741
3	Nambo	4.866	4.805	9.671	1.986

Sumber: Monografi Kec. Klapanunggal Tahun 2003

- Sebagian besar penduduk Kecamatan Klapanunggal berprofesi sebagai buruh (baik buruh tani ataupun buruh pabrik, dan buruh lainnya). Tabel 8 menunjukkan data penduduk Kec. Klapanunggal menurut pekerjaan.

Tabel 8. Proporsi Jenis Pekerjaan Masyarakat Kec. Klapanunggal Tahun 2003

NO	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)
1	PNS	282
2	POLRI	42
3	TNI	249
4	Karyawan	13.324
5	Wiraswasta	11.320
6	Pertukangan	5.872
7	Buruh	13.846
8	Lain-lain	17.681
Total		62.616

Sumber: Monografi Kec. Klapanunggal Tahun 2003

- Apabila dilihat dari tingkat kesejahteraannya maka wilayah Ring I (desa Klapanunggal, Kembangkuning, dan Nambo) masih memiliki keluarga dengan status Prasejahtera masih cukup besar. Tabel 9 menunjukkan jumlah keluarga berdasar-kan tingkat kesejahteraannya.

Tabel 9. Kondisi kesejahteraan Masyarakat Wilayah Ring I Tahun 2003

NO	Wilayah	PRA KS	KS I	KS II	KS III	KS III+	JUMLAH
1	Klapanunggal	253	806	488	53	7	1.607
2	Kembangkuning	574	675	811	447	233	2.740
3	Nambo	1.070	888	763	306	35	3.062
4	Kec. Klapanunggal	4.824	3.584	5.954	2.490	547	17.499

Sumber: Monografi Kec. Klapanunggal Tahun 2003

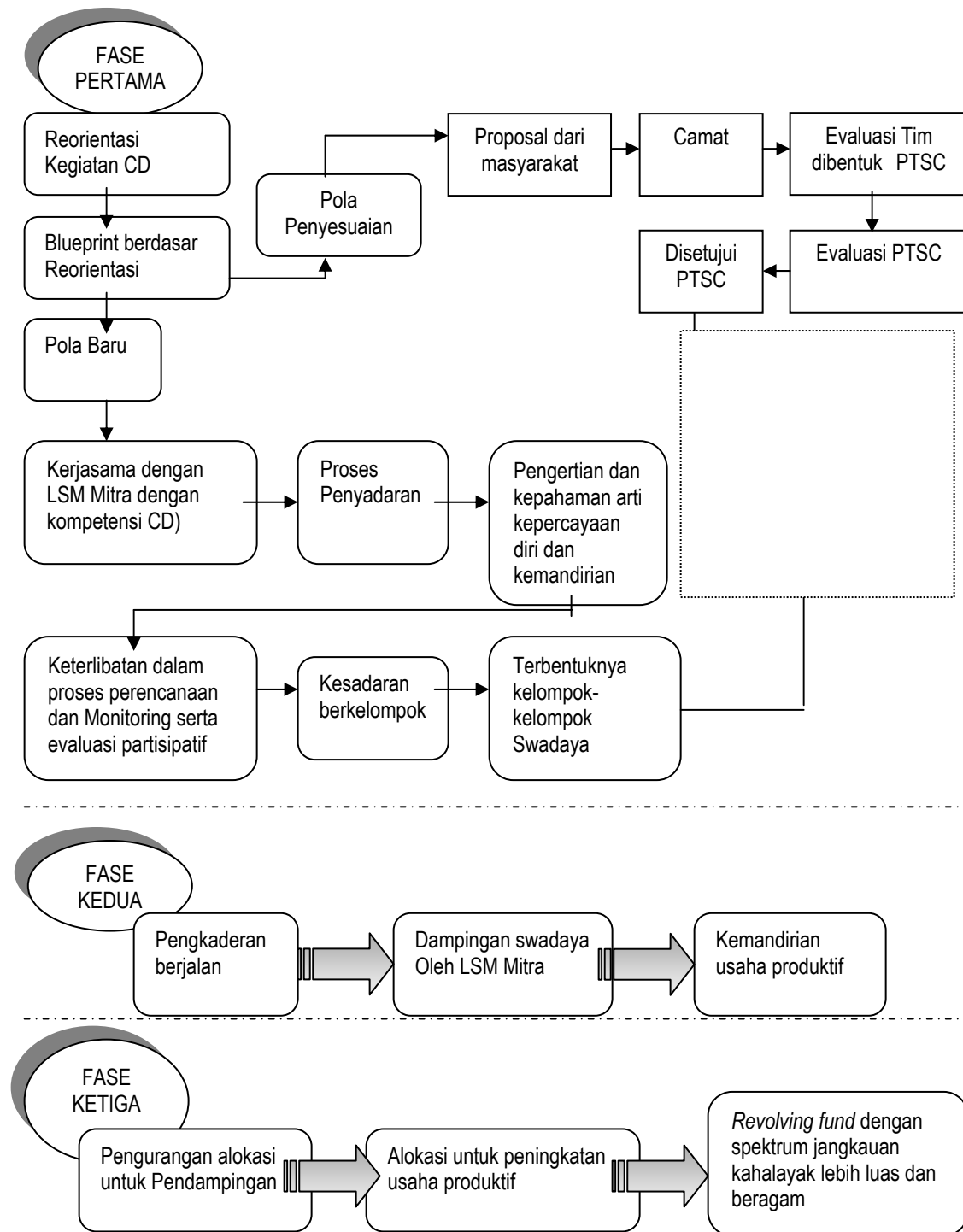
Berdasarkan faktanya PTSC telah melakukan upaya-upaya pemberdayaan terhadap komunitas lokal, walaupun masih bersifat parsial. Dalam konteks ini maka harus ada kemauan kuat dari manajemen PTSC untuk melakukan tindakan terencana sebagai berikut yang dilaksanakan secara bertahap:

- (1) Meningkatkan kemampuan staf CRSA untuk menguasai pengertain CD dan teknik-teknik operasional yang diperlukan dalam kegiatan CD, dengan cara memberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan CD,
- (2) Melakukan kerjasama dengan pihak tertentu bisa LSM atau semacamnya yang memiliki kompetensi di bidang pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian pengelolaan dana dapat dilakukan secara *outsourcing* dengan pihak LSM

- (3) Sejalan dengan pemikiran ini maka pada suatu awal tahun, PTSC melakukan kegiatan awal dibutuhkan penjadwalan berupa skenario alokasi dana yang jelas yang difokuskan untuk memfasilitasi LSM yang diajak kerjasama, sehingga dapat melakukan proses penyadaran terhadap masyarakat. Pola fasilitasi oleh LSM terhadap masyarakat disepakati dengan penetapan indikator pencapaian sehingga dapat diukur baik oleh PTSC maupun LSM mitra.
- (4) Selanjutnya dengan LSM mitra melakukan proses pendampingan yang terfokus pada kegiatan penyadaran potensi masyarakat kepada kemandirian masyarakat, sedangkan alur proses kegiatan bantuan secara bertahap dengan mekanisme yang lama masih dapat diterapkan. Ini untuk memberikan kesempatan dan mengkondisikan kesiapan CRSA, masyarakat sekaligus pemerintah lokal.
- (5) Selanjutnya apabila masyarakat telah memiliki pengertian terhadap arti penting bekerjasama dengan PTSC untuk membentuk kemandirian, maka upaya-upaya kearah pengembangan pengorganisasian atau pembentukan kelompok dapat diupayakan
- (6) Pembentukan kelompok ini untuk memudahkan koordinasi dan proses belajar. Dari kondisi yang ada, nampak bahwa mayoritas keluarga buruh sebagai segmen terbesar dari masyarakat di Kecamatan Klapanunggal dapat diberdayakan.
- (7) Orientasi kapasitas terhadap anggota kelompok dilakukan dengan pembekalan motivasi sampai teknis usaha produktif sesuai pilihan. Anggota keluarga dari buruh dapat menjadi sasaran. Misal apabila suami bekerja sebagai buruh PTSC, maka istri dapat diberdayakan dengan mengikutsertakan pada kelompok yang homogen.
- (8) Setelah orientasi kapasitas terhadap anggota kelompok, maka dibarengi dengan kapasitas terhadap kelembagaan. Misalnya pada manajemen kelompok, pembukuan sederhana, maupun proses belajar lainnya.
- (9) Pada perkembangannya dengan terbentuknya kelompok-kelompok masyarakat yang akan diberdayakan, maka proses dukungan sistem dan akses terhadap sumber informasi dan dukungan sistem yang lain dapat dijalankan. Pada fase ini maka proses fasilitasi CRSA dapat dilakukan secara bersama-sama dengan LSM Mitra.
- (10) Selanjutnya bila terbentuk kelompok-kelompok yang kuat, maka proses kaderisasi untuk pemberdayaan dengan sendirinya dapat dijalankan.
- (11) Apabila kaderisasi dapat berjalan sebagaimana diharapkan maka dampingan terhadap masyarakat lokal dapat dilakukan oleh masyarakat sendiri dalam rangka memecahkan masalahnya sendiri. Apabila hal ini dapat berjalan lancar, maka alokasi pendanaan untuk tenaga dampingan dapat dikurangi, sehingga dapat dialokasikan untuk memfasilitasi peningkatan usaha produktif kelompok-kelompok swadaya masyarakat yang sudah terbentuk.
- (12) Terbentuknya kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang kuat dan berjalan efektif, dengan sendirinya dapat menggulirkan dana bantuan yang diberikan PTSC. Selanjutnya pendanaan untuk kegiatan yang sama dapat dilakukan di daerah Ring II, melebar ke daerah yang lebih luas. Dengan demikian cakupan pemberdayaan semakin melebar.

Dengan memperhatikan kondisi ini, maka terdapat tiga fase penting yang dapat dilalui oleh CRSA menuju pencapaian kemandirian masyarakat Ring I yang diberdaya-

kan, sampai pemberdayaan menuju spektrum khalayak yang lebih luas. Secara skematis diagram pemikiran ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3. Skema Model Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Industri PTSC

IV. PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bahasan pendekatan hubungan yang dilakukan oleh PTSC dan kajian tentang perumusan pemikiran alternatif sebuah model pengembangan masyarakat di PTSC, beberapa poin penting: PTSC masih tergolong karitatif (*corporate charity*) dengan menekankan bantuan langsung pada masyarakat lokal, Kompetensi SDM Departemen CRSA relatif belum optimal terkait dengan pendekatan berspektif *community development*, pembentukan tim verifikasi memungkinkan terjadinya bias disebabkan masyarakat belum optimal terlibat dalam pengambilan keputusan dan monitoring evaluasi secara partisipatif.

Aspek penting dalam konsep pengembangan model pemberdayaan masyarakat yang dapat ditawarkan bertitik tolak dari pencapaian yang sudah ada, dilanjutkan dengan reorientasi kegiatan CD untuk melakukan penyadaran kepada masyarakat, pembentukan kelompok, adanya kader menuju kemandirian usaha produktif yang dijalankan oleh masyarakat lokal serta perluasan spektrum bantuan dana yang bersifat bergulir kepada anggota masyarakat lainnya.

Kejelasan aturan UU, PP, Kepmen yang mengatur hak dan kewajiban dari perusahaan yang melakukan eksploitasi sumberdaya alam di wilayah tertentu, harus segera ditindaklanjuti berupa semacam ratifikasi PERDA sehingga muncul aturan main yang jelas bagi perusahaan dalam mengembangkan masyarakat lokal. Pemerintah daerah hendaknya memfasilitasi terbitnya PERDA yang tegas mengatur sanksi terkait *reward* dan *punishment* yang jelas dalam implementasi CD oleh perusahaan di daerahnya. Dan yang tak kalah penting adalah reorientasi kegiatan CD harus dibarengi dengan pengembangan kemampuan CRSA, sehingga pihak manajemen sebaiknya mengalokasikan anggaran yang jelas bagi staff di CRSA untuk mengikuti Diklat dan semacamnya terkait dengan kompetensi CD di perusahaan.

SUMBER RUJUKAN

- Budiman, A. 2000. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,.
- Conyer, D. 1994. *Perencanaan Sosial di Dunia ke Tiga*. Yogyakarta: Gadjahmada University Press
- Fukuyama, F. 2000. *The Great Disruption: Human Nature and The Reconstitution of Social Order*. NewYork: Simon & Schuster.
- Gani, AR. 2000. *Prosiding Lokakarya Perencanaan Pembangunan dan Implementasi Otonomi Daerah Walikota/Bupati Se-Sulawesi*. Makasar: Pusat Studi Kebijakan dan Manajemen Pembangunan UNHAS.
- Ginting, B. 2003. *Pembangunan Masyarakat: Handout dan Catatan Kuliah*. Bogor: Tidak dipublikasikan.
- Gray, JD. 1959. *Community Development as Preparation for Economic Growth in Developing Countries With Particular Reference to the Saktigar Program in India*. New York: The Agriculture Development Council, Inc.

- Ife, J. 1995. *Community Development: Creating Community Alternatives-Vision, Analysis and Practice*. Sydney: Longman.
- Kecamatan Klapanunggal. 2003. *Laporan Registrasi Penduduk Kecamatan Klapanunggal*. Bogor: Tidak Dipublikasikan.
- Kisubi, MM. 1999. *Involving Civil Society in the Fight Against Coruption dalam* Stapenhurst R, Sahr J Kpundeh. 1999. *Curbing Corruption: Toward a Model for Building National Integrity*. Washington DC: The World Bank.
- PT Semen Cibinong. 2002. *Bantuan Kemitraan PT Semen Cibinong Tbk Untuk masyarakat: Laporan Proyek Community Relations Tahun 2002 PT Semen Cibinong Tbk Pabrik Narogong*. Bogor: Tidak dipublikasikan.
- Saidi, Z. 2002. *Paradigma (Baru) Pengembangan Masyarakat Agenda Strategis: Makalah Workshop on The New Paradigm of Community Development By Corporate*. Jakarta: Community Development Circle – DD Republika.
- Soetrisno, L. 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Jakarta: Kanisius.